

ANALISIS KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

Riyan Zulmaniar Vinahari

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal
email: riyanzv@gmail.com

Abstract

Ketahanan pangan merupakan isu pokok dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Menurut data Susenas Maret Tahun 2018, jumlah rumah tangga yang tidak tahan pangan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 8,9 persen dengan rincian sebanyak 52,2 persen rumah tangga tidak tahan pangan berada di daerah pedesaan dan sisanya sebanyak 47,8 persen berada di daerah perkotaan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui profil ketahanan pangan rumah tangga pedesaan dan perkotaan Provinsi Jawa Tengah dan (2) untuk mengetahui pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap ketahanan pangan rumah tangga pedesaan dan perkotaan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dan menggunakan data sekunder hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2018 yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe daerah (pedesaan dan perkotaan), status menikah kepala rumah tangga (KRT), jenis kelamin KRT, pendidikan KRT, penerima raskin, kepemilikan aset, usia KRT, jumlah anggota rumah tangga, Pengeluaran Pangsang Pangan (PPP), dan pengeluaran per kapita per bulan secara signifikan berpengaruh terhadap status ketahanan pangan rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah.

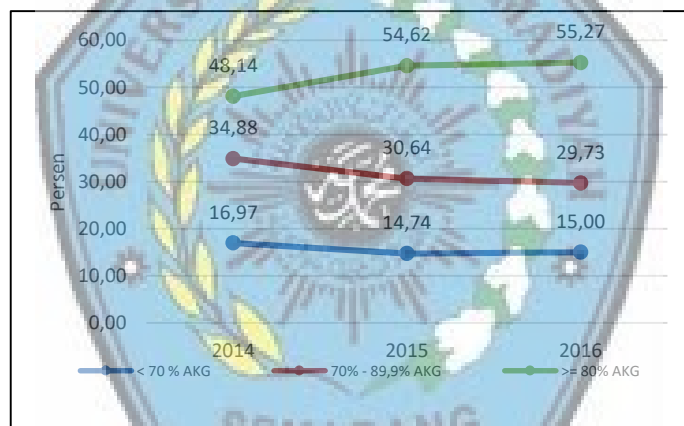
Keywords: ketahanan pangan, pedesaan, perkotaan, regresi logistik, Susenas

1. PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi, sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin untuk mencapai kualitas hidup yang maju, mandiri, tentram, serta sejahtera lahir dan batin (Sa'diyah, 2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan dan *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 juga menyebutkan bahwa pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Didalam undang-undang tersebut juga dijelaskan pengertian ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari terpenuhinya pangan baik secara jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau.

Menurut Suryana (2004), pemenuhan kebutuhan pangan baik dari segi jumlah, mutu, gizi dan keamanannya merupakan pilar bagi pembentukan sumber daya manusia berkualitas untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tataran global. DKP (2016) lebih lanjut menyatakan bahwa salah satu indikator ketahanan pangan adalah terjaminnya konsumsi pangan, sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan serta preferensinya. Berdasarkan hasil Riskesdas 2010, disebutkan bahwa 40,6 persen penduduk Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan energi minimal (<70% kecukupan AKE 2000 kkal/hari). Hal tersebut menunjukkan adanya resiko terjadinya rawan pangan di Indonesia.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah menghitung daerah rawan pangan menurut kabupaten berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Tren Angka Kecukupan Gizi (AKG) Provinsi Jawa Tengah yang lebih dari 80 persen menunjukkan bahwa selama tahun 2014 hingga 2016, jumlah rumah tangga yang tahan pangan di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan. Namun jumlah rumah tangga dengan AKG <70% juga mengalami tren yang meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu dari 14,74 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 15 persen pada tahun 2016. Menurut data Susenas Maret Tahun 2018, jumlah rumah tangga yang tahan pangan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 91,1 persen dan hanya 8,9 persen rumah tangga yang masuk kedalam kategori tidak tahan pangan. Sementara apabila dilihat menurut status wilayahnya, dari 8,9 persen rumah tangga yang tidak tahan pangan tersebut, sebanyak 52,2 persen rumah tangga berada di daerah pedesaan dan sisanya sebanyak 47,8 persen rumah tangga berada di daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah meskipun perbedaannya tidak signifikan. Fakta tersebut semakin menegaskan perlunya penguatan ketahanan pangan khususnya pada penduduk dengan kategori tidak tahan pangan di Provinsi Jawa Tengah, salah satu caranya yaitu dengan mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi ketahanan pangan masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1. Angka Kecukupan Gizi (AKG) Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut, kajian mengenai analisis ketahanan pangan di daerah pedesaan dan perkotaan Provinsi Jawa Tengah sangat diperlukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui profil ketahanan pangan rumah tangga pedesaan dan perkotaan Provinsi Jawa Tengah dan (2) untuk mengetahui pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap ketahanan pangan rumah tangga pedesaan dan perkotaan Provinsi Jawa Tengah.

2. KAJIAN LITERATUR

Ketahanan pangan merupakan cerminan ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan merata yang mampu diakses setiap individu sehingga penyerapannya dapat dilakukan secara maksimal demi pencapaian hidup yang sehat dan produktif. Tirtosudiro dalam Bulog mendefinisikan ketahanan pangan nasional sebagai kemampuan negara untuk menghasilkan jumlah bahan pangan yang memadai bagi seluruh konsumen dengan harga yang terjangkau (Bulog, 1997). Arifin (2005) mengatakan bahwa aspek distribusi pangan mulai dari sentra produksi di pedesaan sampai pada konsumen di perkotaan dan di pedesaan juga tidak kalah pentingnya dalam upaya memperkuat strategi ketahanan pangan.

Demikian pula Kahar (2010) yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai keadaan dimana setiap orang memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan produktif. Berbagai konsep ketahanan pangan ini menjelaskan bahwa pencapaian ketahanan pangan tidak hanya dilakukan dengan memerhatikan ketersediaan pangan saja, tetapi juga factor-faktor lainnya, seperti harga pangan yang terjangkau dan distribusi pangan yang merata, sebagai cara untuk mendapatkan komoditi pangan tersebut.

Sayogyo (2002) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa daerah perdesaan mengalami keterbatasan pengembangan infrastruktur (fisik dan kelembagaan), disamping itu kebijakan pembangunan bias pada daerah perkotaan, khususnya untuk sektor industri, perdagangan, dan jasa. Akibatnya, kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sedangkan daerah perdesaan relatif tertinggal. Keteringgalan tingkat kemajuan wilayah perdesaan juga disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas dan kualitas petani dan pertanian, terbatasnya akses petani terhadap sumber daya permodalan, serta rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perdesaan. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat di perdesaan, yang mencakup sekitar 60 persen penduduk Indonesia, khususnya petani, masih sangat rendah. Hal tersebut tercermin dari jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin di perdesaan yang lebih besar dibandingkan perkotaan. Dari 36 juta penduduk miskin tahun 2004, sekitar 68 persen berada di perdesaan dan umumnya berada di sektor pertanian atau berbasis pertanian (DKP, 2006).

Sukandar, et.all (2006) meneliti studi ketahanan pangan pada rumah tangga miskin dan tidak miskin. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap ketahanan pangan rumah tangga adalah jumlah anggota rumah tangga, umur suami, dan kategori keluarga, semakin kecil jumlah anggota rumah tangga, semakin tua umur suami maka semakin tinggi tingkat kecukupan protein. Keluarga miskin memiliki tingkat kecukupan protein lebih rendah daripada keluarga tidak miskin. Hasil studi Rusyantia (2010) tentang Kajian Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan Dalam Upaya Peningkatan Status Gizi Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa variabel yang berpeluang memengaruhi ketahanan pangan rumah tangga adalah besar rumah tangga, pendapatan rumah tangga, pengeluaran pangan rumah tangga, ketersediaan pangan pokok beras dari produksi sendiri, serta variabel Desa Trimomukti. Semakin banyak jumlah anggota rumah tangga dalam suatu rumah tangga dengan pendapatan yang rendah dan pengeluaran pangan terhadap pendapatan yang tinggi, serta memperoleh sumber pangan pokok beras dari membeli ataupun bantuan dan subsidi serta berasal dari masyarakat Desa Kelawi akan memiliki peluang lebih besar untuk rentan terhadap ketidaktahanan pangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) bulan Maret Tahun 2018 yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Daerah yang menjadi analisis studi ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Data Susenas yang digunakan terdiri dari data Susenas Kor dan Susenas Modul. Setelah data dan variabel ditemukan, dilakukan filterisasi yakni dengan menghilangkan semua data kecuali variabel berikut: asupan kalori harian per kapita, pengeluaran makanan dalam rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, pengeluaran per kapita, klasifikasi wilayah, status menikah kepala rumah tangga (KRT), jenis kelamin KRT, pendidikan terakhir yang ditempuh KRT, status bekerja KRT, penerimaan raskin rumah tangga, penerimaan PKH rumah tangga, kepemilikan aset, umur KRT, dan jumlah anggota rumah tangga

Konsep rumah tangga dalam penelitian ini mengacu pada konsep rumah tangga BPS yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan

dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Meskipun banyak ahli yang mendefinisikan ketahanan pangan rumah tangga dengan menggunakan berbagai macam indikator, namun dalam penelitian ini ketahanan pangan rumah tangga diidentifikasi dengan dua indikator yaitu kecukupan kalori yang dikonsumsi dengan besarnya pangsa pengeluaran pangan. Hal ini berdasarkan klasifikasi silang yang digunakan Johnsson dan Toole (1991) dalam Maxwell et al (2000). Adapun derajat ketahanan pangan rumah tangga berdasarkan kecukupan gizi dan pangsa pengeluaran pangan terlihat pada Tabel 1 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Derajat Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE) per-unit ekuivalen dewasa	Pangsa Pengeluaran Pangan (PPP)	
	Rendah (< 60% Pengeluaran Total)	Tinggi (≥ 60% Pengeluaran Total)
Cukup (> 80% syarat kecukupan energy)	Tahan Pangan	Rentan Pangan
Kurang (≤80% syarat kecukupan energy)	Kurang Pangan	Rawan Pangan

Sumber: Johnsson dan Toole yang diadopsi oleh Maxwell et al (2000)

Angka Kecukupan Konsumsi Energi (AKE) mengacu pada asupan kalori harian per kapita yang direkomendasikan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 75 Tahun 2013 bahwa status gizi (AKG) diukur dengan standar kecukupan rata-rata konsumsi kalori sebesar 2.150 kkal. Pada penelitian ini yang dimaksud pangsa pengeluaran pangan adalah rasio pengeluaran untuk belanja pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga selama sebulan. Untuk mengetahui pangsa pengeluaran rumah tangga digunakan persamaan berikut:

$$PPP = \frac{FE}{TE} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan:

- PPP : Pangsa Pengeluaran Pangan (%)
- FE : Pengeluaran untuk belanja kebutuhan pangan (Rp/ bulan)
- TE : Total pengeluaran kebutuhan rumah tangga (Rp/ bulan)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statistik inferensial yang dilakukan melalui metode regresi logit. Model regresi logit digunakan untuk model regresi respons kualitatif yakni model dimana variabel dependennya bersifat dummy. Regresi logit digunakan dengan tujuan untuk menemukan probabilitas dari sebuah kejadian dalam hal ini status rumah tangga berpotensi tahan dan tidak tahan pangan serta gizinya (Gujarati, 2012). Model yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$L_i = \ln\left(\frac{p_i}{1-p_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 \text{tipe} + \beta_2 \text{status_nikah} + \beta_3 \text{jk_krt} + \beta_4 \text{pend_krt} + \beta_5 \text{status_ker_ja} + \beta_6 \text{penerima_raskin} + \beta_7 \text{penerima_pkh} + \beta_8 \text{aset} + \beta_9 \text{usia_krt} + \beta_{10} \text{jml_art} + \beta_{11} \text{PPP} + \beta_{12} \text{kapita} + \varepsilon$$

(2)

Keterangan:

- L_i : Status Ketahanan Pangan
D = 1, rumah tangga tahan pangan
D = 0, rumah tangga tidak tahan pangan
- Tipe : Klasifikasi desa/ kelurahan

status_menikah : Status perkawinan kepala rumah tangga
 jk_krt : Jenis kelamin kepala rumah tangga
 pend_krt : Pendidikan terakhir yang ditempuh kepala rumah tangga
 status_kerja : Status bekerja kepala rumah tangga
 penerima_raskin: Status penerimaan raskin rumah tangga
 penerima_pkh : Status penerimaan bantuan PKH rumah tangga
 aset : kepemilikan aset rumah tangga
 usia_krt : Umur kepala rumah tangga
 jml_art : Jumlah anggota kepala rumah tangga
 kapita : Pengeluaran per kapita rumah tangga
 PPP : Pangsa pengeluaran pangan (%)

4. HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Tabel 2. Persentase Ketahanan Pangan Rumah Tangga Menurut Tipe Daerah di Provinsi Jawa Tengah

Tipe Daerah	Status Ketahanan Pangan	
	tidak tahan pangan	tahan pangan
pedesaan	4,6%	44,6%
perkotaan	4,3%	46,5%

Tabel 3. Persentase Ketahanan Pangan Rumah Tangga Menurut Status Menikah KRT di Provinsi Jawa Tengah

Status Menikah	Status Ketahanan Pangan	
	tidak tahan pangan	tahan pangan
tidak menikah	0,07%	2,08%
menikah	7,42%	72,57%
cerai hidup	0,18%	2,49%
cerai mati	1,24%	13,96%

Tabel 4. Persentase Ketahanan Pangan Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin KRT di Provinsi Jawa Tengah

Jenis Kelamin KRT	Status Ketahanan Pangan	
	tidak tahan pangan	tahan pangan
perempuan	1,2%	15,5%
laki-laki	7,7%	75,6%

Tabel 5. Ketahanan Pangan Rumah Tangga Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditempuh KRT di Provinsi Jawa Tengah

Pendidikan KRT	Status Ketahanan Pangan	
	tidak tahan pangan	tahan pangan
tidak sekolah	0,74%	5,58%
SD	5,39%	47,15%
SMP	1,67%	14,99%
SMA	1,02%	16,69%
PT	0,09%	6,69%

Tabel 6. Persentase Ketahanan Pangan Rumah Tangga Menurut Status Penerimaan Raskin di Provinsi Jawa Tengah

Status Penerimaan Raskin	Status Ketahanan Pangan	
	tidak tahan pangan	tahan pangan
tidak menerima	3,3%	48,7%
menerima	5,6%	42,4%

Tabel 7. Persentase Ketahanan Pangan Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Aset Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah

Kepemilikan Aset	Status Ketahanan Pangan	
	tidak tahan pangan	tahan pangan
memiliki aset \leq 2	6,3%	45,2%
memiliki aset $>$ 2	2,6%	45,9%

Tabel 8. Persentase Ketahanan Pangan Rumah Tangga Menurut Status Bekerja KRT di Provinsi Jawa Tengah

Status Bekerja KRT	Status Ketahanan Pangan	
	tidak tahan pangan	tahan pangan
tidak bekerja	1,6%	14,9%
bekerja	7,3%	76,2%

Tabel 9. Persentase Ketahanan Pangan Rumah Tangga Menurut Status Penerimaan PKH di Provinsi Jawa Tengah

Status Penerimaan PKH	Status Ketahanan Pangan	
	tidak tahan pangan	tahan pangan
tidak menerima	7,4%	82,8%
menerima	1,5%	8,3%

Hasil Estimasi Regresi Logistik Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan dan Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan teknik analisis yang telah dilakukan, berikut pada Tabel 10 hasil estimasi ketahanan pangan rumah tangga perkotaan dan pedesaan di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan regresi logistik. Berikut ditampilkan nilai koefisien logistik, odds ratio, uji goodness of fit, jumlah observasi, tingkat signifikansi variabel independen dan standard error dengan variabel independen tipe daerah, Status perkawinan kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, pendidikan terakhir yang ditempuh kepala rumah tangga, status bekerja kepala rumah tangga, status penerimaan raskin rumah tangga, status penerimaan bantuan PKH rumah tangga, kepemilikan aset rumah tangga, umur kepala rumah tangga, jumlah anggota kepala rumah tangga, pengeluaran per kapita rumah tangga. Adapun persamaan regresi model logit yang didapatkan dari hasil regresi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 10.

Menurut hasil regresi logit, hasil omnibus test memiliki nilai signifikansi 0,00 dengan taraf kepercayaan 95 persen ($p < 0,05$) yang berarti bahwa tipe daerah, Status perkawinan kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, pendidikan terakhir yang ditempuh kepala rumah tangga, status bekerja kepala rumah tangga, status penerimaan raskin rumah tangga, status penerimaan bantuan PKH rumah tangga, kepemilikan aset rumah tangga, umur kepala rumah tangga, jumlah anggota kepala rumah tangga, pengeluaran per kapita rumah tangga secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap status ketahanan pangan rumah tangga perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Kendal. Hasil Hosmer and Lemeshow Test memiliki nilai signifikansi sebesar 0,845 ($> 0,05$) sehingga menerima H_0 , yang menunjukkan bahwa model dapat diterima dan pengujian hipotesis dapat dilakukan sebab tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Sementara jika dilihat masing-masing variabel, hanya variabel status bekerja kepala rumah tangga dan status penerimaan bantuan PKH rumah tangga dengan taraf kepercayaan 95 persen memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ yang berarti bahwa variabel tersebut secara parsial tidak berpengaruh terhadap status ketahanan pangan rumah tangga pedesaan dan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil estimasi regresi logit menunjukkan bahwa uji ketepatan model menunjukkan sebesar 92,3 persen variabel independent mampu menjelaskan variabel dependent dalam hal ini ketahanan pangan rumah tangga pedesaan dan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah. Ternyata tipe daerah yaitu pedesaan dan perkotaan berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah.

$$L_i = \ln\left(\frac{p_i}{1-p_i}\right) = -19,936 - 0,163tipe - 0,158status_nikah - 0,314jk_krt - 0,187pend_krt + 0,135status_ker_ja + 0,325penerima_raskin + 0,025penerima_pkh - 0,224aset + 0,681usia_krt - 0,591jml_art - 12,97PPP + 7,913kapita + \epsilon$$

Tabel 10. Hasil Estimasi Koefisien Model Regresi Logit Ketahanan Pangan Rumah Tangga Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal

Variabel	Notasi	Koefisien	Sig.	Odds Rasio
Klasifikasi desa/ kelurahan	tipe_desa	-0,16	0,00	0,85
Status perkawinan kepala rumah tangga	status_nikah	-0,16	0,01	0,85
Jenis kelamin kepala rumah tangga	jk_krt	-0,31	0,01	0,73
Pendidikan terakhir yang ditempuh kepala rumah tangga	pend_krt	-0,19	0,00	0,83
Status bekerja kepala rumah tangga	status_kerja	0,13	0,07	1,14
Status penerimaan raskin rumah tangga	penerima_raskin	0,32	0,00	1,38
Status penerimaan bantuan PKH rumah tangga	penerima_pkh	0,02	0,74	1,02
kepemilikan aset rumah tangga	aset	-0,22	0,00	0,80
Umur kepala rumah tangga	log_usia_krt	0,68	0,00	1,98
Jumlah anggota kepala rumah tangga	log_jml_art	-0,59	0,00	0,55
Pangsa pengeluaran pangan (%)	log_PPP	-12,97	0,00	0,00
Pengeluaran per kapita rumah tangga	log_kapita	7,91	0,00	2.732,30
N = 27.294				
P-value Omnibus Test	0.000			
P-value Hosmer and Lemeshow Test	0,845			
Overall Percentage	92,3			

5. SIMPULAN

Variabel yang signifikan berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah: Klasifikasi desa/ kelurahan, Status perkawinan kepala rumah tangga, Jenis kelamin kepala rumah tangga, Pendidikan terakhir yang ditempuh kepala rumah tangga, Status penerimaan raskin rumah tangga, kepemilikan aset rumah tangga, Umur kepala rumah tangga, Jumlah anggota kepala rumah tangga Pangsa pengeluaran pangan (%), Pengeluaran per kapita rumah tangga Sedangkan variabel yang tidak signifikan adalah Status bekerja kepala rumah tangga dan Status penerimaan bantuan PKH rumah tangga

6. REFERENSI

- Arifin, B. (2005). *Ekonomi Kelembagaan Pangan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Dawe, D. (1997). Should Asia Move to Free Trade in Rice?, dalam Sitonga, dkk (eds), 30 Tahun Peran Bulog dalam Ketahanan Pangan. Jakarta: Bulog.
- [DKP-Deptan] Dewan Ketahanan Pangan-Departemen Pertanian. 2006. Penyusun- an Neraca Bahan Makanan Indonesia. Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Ginting, Rahmanta. "Analisis Angka Kecukupan Gizi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Kecamatan Medan Deli." (2017).
- Heryanah, H. KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI JAWA BARAT: ANALISIS DATA SUSENAS 2012. *Populasi*, 24(2), 80-99.
- Kahar, M. (2010). Pola Konsumsi Makanan dan Non-makanan di Provinsi Banten (Doctoral dissertation, Tesis. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor).
- Maxwell, D., Levin, C., Armah-Klemesu, M., Ruel, M., & Morris, S. (2000). Urban livelihoods and food and nutrition security in Greater Accra, Ghana. IFPRI, Washington, DC, US.

- Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan. "Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan daerah 2014: Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan." *Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (2013).
- Nurhemi, Soekro, R. I. Shinta, and Guruh Suryani. "Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia Pendekatan TFP dan Indeks Ketahanan Pangan." *Bank Indones. WP/4* (2014): 1-70.
- Pangan, Dewan Ketahanan. "Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006–2009." *Jurnal Gizi dan Pangan* 1.1 (2006): 57-63.
- Rusyantia, Anggun, Dwi Haryono, and Eka Kasymir. "Kajian Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan dalam Upaya Peningkatan Status Gizi Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan* 10.3 (2017).
- Sa'diyah, L. 2015. "Kontribusi Joglo Tani Di Mandungan Margoluwih Seyegan Sleman Yogyakarta Dalam Peningkatan Peran Pemuda Pada Pembangunan Sektor Pertanian Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan". *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(3), pp.156–162.
- Sayogyo. 2002. *Pertanian dan kemiskinan*. Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel Tahun I No. 2 Jakarta.
- Sukandar, Dadang, et al. "Studi Ketahanan Pangan Pada Rumahtangga Miskin dan Tidak Miskin." *Gizi Indonesia* 29.1 (2006).
- Suryana A. 2004. *Ketahanan Pangan di Indonesia. Dalam Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi*. WNPNG (hal. 39-51). LIPI, Jakarta.

